

Politik dan Tasawuf: Menyeimbangkan antara Partisipasi Sosial dan Kesalehan Individual

Syahuri Arsyi

STAI AlMujtama Pamekasan
syah.arsyie1717@gmail.com

Mohammad Mahmudi

STAI Al Mujtama Pamekasan
mahmudi@stai-almujtama.ac.id

Moh Irwansyah Thoyyib

STAI Al Mujtama Pamekasan
muhirwansyahtoyyib25@gmail.com

Riyan Hidayatullah

STAI Al Mujtama Pamekasan
hidayatullahriyan463@gmail.com

Abstract

The subjects in this paper are politics and Sufism, both of which are very paradoxical themes. Politics in practice is more inclined to the meaning of violence, manipulation and agitation, as well as to something that is materialistic and secular. On the contrary, Sufism means purification of the soul, clean, holy, polite, peaceful, and far from manipulation, and makes a person better without having to leave social life, both in social, political, economic and so on. These two different terminologies will be connected in the context of the application of power politics. In the Islamic world Sufism is one way to help the process of political activity with the aim of creating a just, peaceful and prosperous society. A sufi must take a role in the social sphere including in political upheavals. It is from this that the application of the teachings of Sufism to political activity in its aspect becomes very important.

Keywords: *Politic, sufism, participation society, individual religiousness*

Abstrak

Subyek dalam tulisan ini adalah politik dan tasawuf, dimana kedua merupakan tema yang sangat paradoks. Politik dalam prakteknya lebih condong pada makna kekerasan, manipulasi dan agitasi, serta pada suatu yang bersifat materialisme dan sekuler. Sebaliknya Tasawuf bermakna penyucian jiwa, bersih, suci, santun, penuh damai, dan jauh dari manipulasi, serta menjadikan seorang lebih baik tanpa harus meninggalkan kehidupan sosial, baik dalam tatanan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Kedua terminologi yang berbeda ini akan terhubung dalam konteks penerapan politik kekuasaan. Di dunia Islam tasawuf menjadi salah satu jalan dalam memandu proses aktivitas politik dengan tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Seorang sufi harus mengambil peran dalam bidang sosial termasuk dalam pergolakan politik. Dari sinilah penerapan ajaran-ajaran tasawuf ke dalam aktivitas politik dalam aspeknya menjadi sangat penting.

Kata Kunci: *Politik, Tasawuf, Partisipasi Sosial, dan Kesalehan individual*

Pendahuluan

Dikursus hubungan Islam (baca: tasawuf) dan politik dalam sejarah merupakan tema yang hingga kini masih tetap menarik untuk dikaji. Hal ini tentu terlihat dimana dalam praktik politik negara-negara berpenduduk Muslim masih menjadi tarik menarik. Tarik menarik ini, terjadi antara kelompok (baca; partai politik) yang memiliki hasrat besar menjadikan Islam sebagai dasar negara secara formal. Kelompok ini sudah merasa cukup hanya dengan mengambil nilai yang terkandung di dalamnya tanpa bentuk formalnya. Tentu, ada yang menginginkan negara benar-benar melepaskan diri dari Islam atau dengan kata lain menjadi negara sekuler.

Dalam perkembangannya, paling tidak, selama ini ada tiga paradigma yang berkembang mengenai hubungan Islam dan politik; paradigma *pertama*, Islam merupakan agama yang menyeluruh sehingga politik adalah bagian integral daripadanya, dimana Islam juga menyajikan suatu tatanan politik khas Islam yang dilaksanakan atas dasar kedaulatan ilahi, bukan pengadopsian dari ajaran, dan tradisi, serta kebudayaan lain. Para pemikir Muslim yang masuk dalam kelompok ini seperti, Abul A'la

al-Maududi, Hassan al-Banna dan Sayyid Quthb. Paradigma *kedua*, adalah Islam sebagaimana dipahami mayoritas dunia Barat hanya sebatas mengatur antara hubungan vertikal, personal, dan privat dengan Tuhan. Persoalan politik merupakan persoalan sekuler, bukan pada wilayah tataran agama. Pandangan ini diwakili oleh pemikir Muslim seperti, Ali Abdur Raziq dan Thaha Husein. Paradigma *ketiga*, Islam sebagai agama tidak menyajikan seperangkat sistem tersendiri terkait negara, akan tetapi hanya menyajikan seperangkat nilai yang bisa diterapkan dalam bentuk sistem kenegaraan. Pemikiran ini diwakili oleh Husein Haikal dan sekian banyak pemikir Muslim yang memiliki keyakinan seperti hal tersebut.¹

Dari berbagai rumusan, hubungan Islam dan politik tersebut pada dasarnya merupakan hasil dari sistematisasi ajaran-ajaran Islam dan tradisi yang berkembang di dunia Muslim di bidang politik. Dimana secara normatif dan historis sama-sama memberikan kontribusi dalam membangun paradigma hubungan Islam dan politik. Data historis menjadi bukti bahwa banyak sekali fenomena persaingan kelompok pemikiran yang bersifat keagamaan, tasawuf, teologi maupun fiqih dalam merebut pengaruh berpatronasi dengan penguasa politik.²

Selain itu, dalam sejarahnya, interaksi antara Islam dan politik bisa dilacak sejak awal pada masa Nabi Muhammad. Dimana padakenyataannya, Nabi Muhammad berhasil memperaktekkan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan dengan membangun komunitas politik yang bersih. Dukungan politik masyarakat Madinah tidak disia-siakan. Nabi Muhammad tampil di tengah masyarakat dengan mengambil peran dalam menyatukan berbagai konflik kepentingan melalui piagam Madinah.³

Begitu Nabi Muhammad wafat, persoalan pertama yang muncul dalam dunia Islam adalah persoalan politik yang menjadi semakin keruh

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1999), 1-2

² A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Pencatutan dalam konsituante*, (Jakarta: LP3ES, 1996), 18.

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1999), 16, Nourouzzaman shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), 94.

dan runyam dengan pandangan serta pemikiran sendiri. Bahkan, dikalangan umat Islam muncul pandangan keagamaan yang digunakan untuk melegitimasi pandangan politik kaum Muslim tertentu. Oleh karenanya, diskursus keagamaan dalam Islam pada awalnya banyak diicu persoalan-persoalan politik. Harun Nasution merasa aneh terkait hal ini, Islam sebagai agama, justru persoalan pertama yang muncul adalah persoalan politik, bukan persoalan keagamaan.⁴ Ini kenyataan yang secara historis memberikan kontribusi dan memformulasi konsep keagamaan yang kadang dimanfaatkan untuk memberi legitimasi pada kekuasaan politik yang tidak hanya sekedar legitimasi *status quo* bagi kekuasaan politik yang berkuasa.

Kata politik diambil dari bahasa Inggris *politic* yang berarti *acting or judging wisely, well judge, prudent*.⁵ Istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *politicos* dan bahasa Latin *Politicus* yang berarti berhubungan dengan warga negara. Istilah tersebut kemudian menjadi bahasa serapan oleh bahasa Indonesia dengan beberapa arti seperti segala suatu urusan dan tindakan berupa kebijaksanaan, siasat dan sebagainya, mengenai pemerintahan suatu negara atau negara lain, tipu muslihat atau kelicikan dan sebagaimana bagi sebuah disiplin ilmu yaitu ilmu politik.⁶

Selain itu, secara terminologis politik oleh sebagian orang dianggap hal yang kotor dan identik dengan kecurangan, keserakahan, serta penuh tipu daya. Karena kata ini dalam kamus-kamus bahasa Arab modern kata politik diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Dimana kata ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya.⁷

⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), 1

⁵ A.S. Hornby A.P Cowic (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1974), 645.

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 763.

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan*, (Bandung: Mizan, 1996), 548.

Oleh karena itu, politik pada umumnya dapat dikatakan sebagai berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem menyangkut proses menentukan atau pelaksanaan tujuan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut diisyaratkan secara mutlak adanya kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai untuk membina hubungan kerja yang baik maupun untuk menyelesaikan berbagai kepentingan yang muncul dalam suatu negara.

Dari pemaparan ini pula dapat dibedakan bahwa dalam diskursus politik ada dua konsep utama yang berlaku; kewenangan dan kekuasaan (*authority and power*). Kewenangan dan kekuasaan ini yang memungkinkan siapa pun bisa melakukan tindakan secara efisien dan efektif, sehingga ada yang menjadi target mudah dicapai. Karena kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*Institutionalized Power*).⁸ Atau seperti yang dikatakan Lasswell dan Kaplan, Kewenangan adalah kekuasaan formal (*Formal Power*).⁹ Dengan konsep ini, politik yang didasarkan pada kewenangan teraktualisasikan melalui lembaga-lembaga resmi. Sehingga, pada akhirnya konsep ini menyakatakan bahwa politik memusatkan perhatian pada negara dan berbagai lembaga formal yang ada didalamnya. Sistem politik formal menandakan adanya aturan yang baku dalam bentuk undang-undang tertulis dan mengharuskan kekuasaan yang tidak terputus, yakni tidak boleh ada kekosongan dalam kekuasaan. Jika itu terjadi, maka dimungkinkan ada kekacauan.¹⁰

Sementara tasawuf merupakan ilmu hati, yang bertujuan untuk mengenal Allah secara mendalam dan menjadikan perilaku seseorang baik bahkan lebih baik lagi. Dalam prakteknya, tasawuf dari zaman ke zaman mengalami perbedaan-perbedaan antara pelakunya. Salah satunya adalah tasawuf sosial yakni tasawuf yang tidak hanya mementingkan

⁸ Mariam Budiarjo. *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 89.

⁹ Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, (New Haven: Yale University Press, 1950).

¹⁰ Muhammad Mahmudi dan Ludfi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekosongan Hukum Penundaan Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum)*, Vol.2, No. 2, 2023.

kesalehan individual, akan tetapi juga peka dan terlibat dalam pergerakan sosial, atau dengan kata lain kesalehan sosial.

Tasawuf selalu diidentikkan dengan perilaku asketis, seolah-olah tasawuf tidak pernah memandang kehidupan sosial masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian kaum sufu yang memilih kehidupan asketis. Hal demikian inilah yang menyebabkan tasawuf dipandang sebagai biang keladi atas kemunduran umat Islam. Salah satu yang paling mencolok adalah ajaran al-Ghazali yang mengajarkan amalan '*uzlah*' yaitu suatu sikap menyendiri dan melepaskan diri dari keterlibatan dengan permasalahan dunia. Walaupun pandangan ini oleh sebagian kaum intelektual dianggap tidak tepat.

Jika memandang jauh secara mendalam pada historisitas tawasuf yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah penganutnya juga berkecimpung dalam dunia sosial dan politik di dalam masyarakat, bukan sikap sebaliknya. Tujuannya adalah baik dalam tatanan sosial maupun perpolitikan, tidak adanya keburukan, dan kejahatan. karena tasawuf mengajarkan sikap jujur, amanah dan sikap-sikap baik lainnya, yang menjadikan pengamalnya menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah.

Secara historisitas, tasawuf lahir dari berbagai fenomena ajaran Islam yang diawali dari ketidakpuasan terhadap praktek ajaran Islam yang cenderung formalistik dan legalistik. selain itu, tasawuf juga sebagai kritik terhadap setting sosial, politik, ekonomi dan moral yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya kalangan penguasa pada waktu itu. Dimana pada saat itu, tampil beberapa tokoh sufi yang memberikan solusi dengan ajaran tawasufnya. Solusi tersebut berupa pemembenahan dan transformasi tindakan fisik menuju tindakan spiritualitas batin.¹¹

Di dunia modern dan kontemporer tasawuf dan politik menjadi dua hal yang sangat paradoks. Politik dalam prakteknya lebih condong pada hal-hal yang bersifat materialisme dan sekuler, sehingga sebagian

¹¹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: Amzah, 2015), 11, lihat; M. Solihin dan Rosihan Anwar, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008); Haidar Baqir, *Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Mizan, 2017); Hamka, *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1980).

besar sufi sangat enggan untuk berkecimpung dan terlibat aktif dalam dunia politik, bahkan ada kecenderungan untuk menjauhinya. Di sisi lain, para kaum politikus memandang orang yang mengamalkan tasawuf sebagai orang yang mengekang kreativitas dan ambisi politik. tentu dua hal ini sangat keliru, karena tasawuf merupakan jalan untuk menjadikan seorang menjadi lebih baik tanpa harus meninggalkan kehidupan sosial, baik dalam tatanan sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Paling tidak ada dua alasan mengapa ajaran tasawuf harus dipromosikan kembali di berbagai belahan dunia saat ini: *pertama*, banyak manusia modern mencari pemuasan dahaga spiritual di tengah-tengah individualisme dan materialisme era modern yang dianggap bisa memenuhi segala keinginan tawaran akan dunia. *Kedua*, belakangan upaya-upaya menarik mundur kebudayaan Islam ke arah Islam klenik, perdukunan, meditasi dengan kedok tasawuf atau tarekat. dimana hal ini sangat mudah dijumpai hampir semua lapisan baik masyarakat kota mau non-urban yang dahaga spiritualitas tanpa agama dengan kapitalisme-hedonisme. urban sufisme bagi masyarakat Muslim perkotaan dalam bentuk spiritualisme dicitrakan melulu hanya mengurus persoalan jiwa manusia serta terkesan menjauh dari relaitas sosial yang semakin timpang dan tidak adil. Kenyataan ini telah membuka pedebatan di kalangan kaum intelektual dan para sarjana yang cukup luas bagi kalangan pemikir Muslim untuk mencari model tasawuf alternatif yang bisa melampui model tasawuf klasik, dan modern yang bisa mengedepankan zuhud dan kontemplasi.¹²

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa dalam kepenulisan ini mempunyai dua variabel yang berbeda yaitu politik dan tasawuf, yang keduanya mempunyai wilayah yang sangat berbeda. Keduanya saling memberi inspirasi. Inspirasi tersebut bukan hanya berjalan satu arah melainkan saling timbal balik. Pandangan tasawuf memberi inspirasi bagi konsep politik yang dikembangkan; sebaliknya peristiwa-peristiwa politik yang terjadi juga menjadi inspirasi bagi terbentuknya pandangan sufistik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kekuasaan politik harus mendapatkan dukungan yang kuat melalui bahasa tasawuf?

¹² Andi Eka Putra, "Tasawuf dan Perubahan sosial-Politik", Jurnal *TAPis*, Januari-juni, 2012, volume 8. No.1, 63.

Mengingat konteksnya yang sangat berbeda, Mengingat konteksnya yang sangat berbeda, apakah politik hanya menghasilkan dimensi sosial kekuasaan dan tasawuf hanya menghasilkan kesalehan individual? apakah masih relevan untuk dijadikan acuan nilai-nilai tasawuf dalam politik tanpa harus melakukan pemaknaan ulang? Inilah kegelisahan yang mendorong penulis kemudian melakukan penulisan tentang penerapan ajaran-ajaran tasawuf ke dalam aktivitas politik.

Mendudukan Tasawuf dan Politik

Islam sebagai agama yang hadir dengan konsep perlawanan dan ketundukan sejak dulu hingga kini sudah terseret sedemikian dalam tanpa mampu mendesain dirinya secara elegan ke pusaran politik praktis (*real politic*). Islam mengalami metaformosis radikal dan kharisma ke dalam rutinitas dari transendensi ke pragmatisme-rasional. Rutinisasi dan rasionalisasi ini dalam beberapa hal secara eksklusif didefinisikan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang dianggap sangat mendesak.¹³

Dampak dari pola hidup yang dianggap sangat mendesak oleh kebutuhan material, ide-ide revolusioner berubah menuju kalkulasi hidup untuk mencapai tujuan tertentu menjadi sangat pendek. Sehingga semangat Islam berubah menjadi sangat radikal dari intelek ke kekuasaan dan dari spiritual ke kapital. Nalar intelektual dan nalar spiritual ini yang perlahan-lahan ditinggalkan dalam kamar gelap Islam berganti dengan nalar kekuasaan dan nalar harta dalam kamar besi kapitalisme. Realitas ini kemudian berubah menjadi suatu realitas objektif, yang berada di luar diri manusia. Realitas objektif yang merupakan hasil objektivasi secara sosial, dapat digunakan untuk menjaga keteraturan di dalam masyarakat.¹⁴

Dalam historisitasnya, nalar kekuasaan objektif tersebut muncul sejak abad pertama Islam yang merupakan abad yang paling sangat baik

¹³ Komaruddin Hidayat dan Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama': Tafsir kepemimpinan Era Reformasi dan Dialektika Ulama-Negara*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), xviii.

¹⁴ Ahmad Nurcholis, "Tasawuf Antara kesalehan Individu dan Dimensi Sosial", *Jurnal Teosofi*, Volume I Nomor 2 Desember 2011, 183-184

bagi penyebaran asketisme sebagai akibat dari ketidakpuasan atas materialisme dan pertikaian politik dan agama. Pada paruh kedua abad pertama hijriyah atau abad ke-7 Masehi, pergerakan asketisme masih bersifat ortodoks dan pemimpinnya merupakan orang-orang yang dianggap paling soleh. Gerakan asketisme pada awal abad kedua Islam dengan semangat penolakan terhadap materialisme dan hasrat keduniawian secara berangsur-angsur menyatu dengan kecenderungan ke arah mistisisme, sehingga berkembanglah apa yang kemudian dikenal dengan tasawuf dalam bentuk paling klasik.¹⁵

Pandangan di atas tersebut, membuahkan dampak bahwa tasawuf dalam makna yang paling awal seringkali dianggap sebagai sumber kemunduran pemikiran umat Islam. Sejak kemunculannya, tasawuf telah menuai kontroversi dan kritik bahkan sebagaimana kalangan Islam sendiri menolaknya sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Salah satu sasaran kritik terhadap tasawuf yang selama ini berkembang tentang ajaran asketisme dan zuhud yang dianggap tidak relevan bagi kemajuan zaman dan pembangunan. Tasawuf justeru dituding sebagai penghambat kemajuan pemikiran dan kebudayaan umat Islam.

Tudingan-tudingan terhadap tasawuf sebagai penghambat kemajuan umat Islam, tentunya tidaklah tepat. Jika dilihat dari historisitasnya, kekuasaan pada saat tasawuf muncul kepermukaan memiliki kecenderungan pada materialisme duniawi, di mana pada saat itu para pemimpin umat Islam sendiri hidup dalam kecintaan duniawi. pada akhirnya, para kaum sufi memilih jalan politiknya dengan hidup zuhud dan *uzlah* sebagai bentuk penolakan kepada penguasa pada saat itu. Walaupun pandangan ini jika dikaitkan dengan saat kurang tepat.

Dalam pandangan Abu Wafa al-Taftazani mengartikan tasawuf sebagai cara bertahap yang harus dilakukan setiap manusia untuk mencapai kesempurnaan moralitas, dan pemahaman tentang hakikat, serta kebahagiaan *qadsiyah* atau yang suci.¹⁶ Pengertian ini tentu bermakna

¹⁵ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014), 130.

¹⁶ Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, *Sufi dan Zaman ke Zaman*, (Bandung: pustaka, 1985), 3.

bahwa dengan bertasawuf seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, kesucian hati, dan moral serta akhlak yang terpuji.

Sementara Buya Hamka mengartikan *uzlah* dalam kehidupan modern adalah memisahkan diri. Dengan pengertian bukan benar-benar menjauhkan diri dari urusan duniawi, sebab jika *uzlah* dalam tasawuf diartikan menjauhkan diri dari urusan duniawi adalah keegoisan diri dan hal tersebut termasuk *uzlah* yang sangat lemah. *Uzlah* dalam pengertian yang benar di kehidupan modern adalah menyusun kekuatan dengan tindakan dan program yang nyata, untuk kemudian merebut kembali tempat yang hilang.¹⁷

Dalam konteks politik tersebut inilah peran-peran penting tasawuf sebagai pondasi dalam membentuk perpolitikan. sebagaimana diketahui tasawuf adalah ilmu menyucikan moral dan akhlak, merasakan hakikat sebagai kebahagiaan ruhaniyah.¹⁸ tentu dengan ajaran-ajaran tasawuf akan memperindah dunia politik sehingga akan dapat terhindar dari keculasan, keserakahan dan perbuatan-perbuatan tidak terpuji.

Historisitas Kaum Sufi dalam Pergerakan Politik

Pada masa-masa awal perkembangan Islam, kata “tasawuf dan “sufi” belum dikenal sama sekali. Kata ini adalah ungkapan baru yang masuk ke dalam Islam yang dibawa oleh umat-umat lain. Maka pemaknaanya sangat berbeda dengan tasawuf di era modern, tentu berbeda dengan tasawuf di era klasik. Di era modern para kaum sufi tidak harus menjauhi kekuasaan sebagaimana di era kalsik. Bagi kaum sufi yang pandai dalam bidang politik harus tampil kepermukaan. Sebab jika kaum sufi menjauhkan diri, hal tersebut menunjukkan bahwa tasawuf adalah sumber ketidakberdayaan dan kelemahan. Apalagi pada masa klasik ada fatwa untuk menjauhi dan bersikap oposan terhadap kekuasaan, dimana hal ini sedikit banyak dibenarkan karena kekukaasan pada saat itu lebih mementingkan individual. sementara di era modern lebih bersifat

¹⁷ Hamka, *Renungan Tasawuf*, (Jakarta: Republika, 2017), 153.

¹⁸ Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, *al-Madkhal Ila al-Tasawwuf al-Islam*, (al-Qahirah; dar al-Tsaqafah, tt), 03.

kolektif.¹⁹ Namun, sikap oposan terhadap kekuasaan sendiri adalah bentuk dari politik kaum sufi.

Dalam catatan historisitas banyak kaum sufi yang bergelut dalam kekuasaan politik dan juga ada kaum sufi yang berada sebagai oposisi misalnya, Hasan al-Basri adalah sufi yang disebut sebagai orang yang mewakili pihak oposisi ini. dalam beberapa catatan hal tersebut dilakukan Hasan al-Basri karena ada semacam pandangan bahwa penguasa kala itu yaitu dinasti Umayyah kurang religius dan berlaku sewenang-wenang serta sering mengabaikan peraturan agama. ketokohan Hasan al-Basri banyak mengilhami kelompok yang menentang perilaku hidup penguasa kala itu. Di antara kelompok yang diilhaminya adalah Mu'tazilah yang dipimpin oleh Washil bin Atha'.

Sementara kaum sufi yang bergerak di bidang sosial dan politik juga tidak kalah penting peranannya dengan kaum yang bukan sufi. Kaum sufi bergerak dalam bidang sosial dan politik melalui gerakan tarekat-tarekat sebagai kekuatan politik dibanyak negeri Islam. Gerak tarekat safawi misalnya, berubah dari gerakan spiritual menjadi gerakan politik dan militer, yang pada akhirnya berhasil mendirikan kerajaan safawi di persia, yang didirikan oleh Syekh Safiuddin (1252-1334 M), seorang sufi suni yang berasal dari keluarga Kurdi di Iran Barat Laut. gerakan safawi menggambarkan kebangkitan Islam populer dalam melawan dominasi militer yang ekspolitatif.²⁰

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali seorang sufi besar abad ke-5 yang dikenal dengan ajaran zuhud dan *uzlah*-nya tidak pasif dan lepas tangan terkait persoal politik. ini terbukti dari salah satu karyanya yang berjudul *al-Tibr al-Masbuk fi al-Nasaihu al-Muluk* yang berisi nasehat-nasehat untuk penguasa. Imam al-Ghazali memiliki pandangan mengenai kepemimpinan, di dalam pandangannya pemimpin (al-Wilayah) adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah swt jika digunakan untuk kemasalahatan manusia. Hal tersebut terbukti dengan menjadi perdana

¹⁹ HM. Amin Syukur, *Mengugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggungjawab Sosial Abad 21*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, 116-117.

²⁰ Syafi A. Mughni, *Dinamika Intelektual Islam pada Abad Kegelapan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), 23.

menteri di era Nizam al-Muluk meski masih berusia 28 tahun.²¹ Namun sebaliknya, jika menjadi penguasa berbuat dzalim dengan kekuasaannya serta mengikuti hawa nafsunya, maka kaum sufi tersebut telah menempatkan posisinya sebagai musuh Allah swt.²²

Pada abad ke-13 dan abad ke-14, ketika umat Islam berada dalam keadaan kegelapan dan disintegrasi besaran-besaran akibat serbuan perang salib di sebelah barat tanah arab dan penaklukan tentara Mongol di sebelah timur Persia dan Asia Tengah, wacana kebangkitan sufisme dan praktiknya dapat dikatakan membawa angin segar. misalnya, syair-syair jalaluddin Rumi dan aforismenya mampu memperteguh kembali jiwa masyarakat Muslim yang sedang koyak akibat pembantaian dan penjarahan besar-besaran tentara Mongol; penyerbuan yang menyebarkan rasa pesimisme dan membuat orang-orang kaum Islam hilang rasa percaya diri terhadap kekuatan terpendamnya dan agama yang dianutnya.²³

Sedangkan sejak abad ke-19 hingga abad ke-20 M gerakan-gerakan sufi utama bergerak di benua Afrika dan Asia. Hal ini karena tidak bisa dilepaskan dari mainstream gerakan-gerakan Islam. Banyak kaum sufi yang menjadi tokoh-tokoh dalam masyarakat yang menjadi pemimpin gerakan-gerakan pembaharuan dan melawan penindasan terhadap penguasa asing dan kolonialisme.²⁴ Badiuz zaman Said Nursi, seorang sufi besar termasuk dalam tokoh yang memberikan pengaruh besar dalam perpolitikan di Turki pada masanya. Misalnya, menolak bekerjasama dengan mustafa kemal yang mengajak memberontak pada pemerintah yang sah. Said Nursi mendatangi penguasa dan memberi nasehat dengan menulis surat nasehat kepada pejabat-pejabat pemerintah. Bahkan mendukung kepemimpinan Adnan Menderes dan sebagainya. Gerakan politik Said Nursi berorientasi pada penguatan politik massa. Dalam

²¹ H.M. Amin Syukur dan Masyaharuddin, *Intelektualisme Tasawuf: Studi Intelektualisme Tasawuf al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 129.

²² Imam al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi al-Nasaihu al-Muluk*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988) 14-18.

²³ Ajit Thohir, *Gerakan Politik Kaum Tarekat: Telah Historis Gerakan Politik Antikolonialisme Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah di Pulau Jawa*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 17.

²⁴ Shaykh Fadhlalla Haeri, *the Elements of Sufism*, (USA: Element Inc, 1994) 91.

pandangannya bahwa gerakan dengan kekuatan senjata pada masanya sudah tidak efektif. Oleh karena itu, Said Nursi mempersepsikan Politik sebagai perilaku politik yang paling bejad dan jahat setimpal dengan cara-cara syaitan yang menyesatkan, serta membangun sistem politik dengan gerakan masa yang didasarkan pada keyakinan Islam belandaskan al-Quran.²⁵

Kemunculan tarekat yang berkembang dalam dunia tasawuf pun tidak bisa lepas dari realitas politik dan setting sosial masyarakat yang seringkali meliputinya. Dalam beberapa perkembangannya selanjutnya tasawuf juga banyak dipengaruhi oleh tekanan politik masyarakat. Politik dan tasawuf walaupun memiliki sisi yang berbeda, namun keduanya tidak bisa dipisahkan apalagi dilepaskan.

Ajaran-ajaran tasawuf sebagai Dasar dalam berpolitik

Membahasakan fungsi Tasawuf tidak dapat dilepaskan dari refleksi tentang pengalaman hidup manusia itu sendiri. Sebab pada hakikatnya ajaran-ajaran tasawuf adalah melatih manusia agar memiliki jiwa yang tangguh, ketajaman hati dan budi pekerti yang luhur. Tasawuf juga sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah swt. dalam mendekati diri kepada-Nya, tasawuf mengajarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang. Tahapan dalam tasawuf dikenal sebagai maqamat. diantara tahapan yang dapat dijadikan dasar dalam politik seperti *tawakkal*, wara' zuhud, sabar, uzlah, syukur dan ridha. Ajaran-ajaran ini dilakukan akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang mulia atau *Insan Kamil*.

Ajaran tawakkal kepada Allah dalam tasawuf akan menyebabkan seseorang memiliki pandangan kokoh, karena telah mewakili atau menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah swt. seperti orang yang akan menaikki jet pesawat supersonik dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak akan merasa nyaman dan menikmati perjalanannya jika selalu merasa akan jatuh dan akan mati. Pada saat manusia tidak mampu lagi memahami dan menjelaskan apa yang dialami, terutama

²⁵ Suhayib, "Pemikiran Tasawuf Said Nursi dalam Pemberdayaan Politik (al-Tamkin al-Siyasi) Masyarakat Muslim Turki: Studi atas Kitab al-Matsnawi al-Nuri", Jurnal *An-Nisa*, Januari-Juni, Vol.38. No.01, 63.

apabila manusia berhadapan dengan kekecewaan dan kematian. Dalam keadaan seperti itu, manusia membutuhkan *transedensi* bagi pengalaman-pengalaman tersebut, atau apa yang disebut juga sebagai referensi *transendental*. Proses transedensi tersebut dapat memberikan makna pamungkas atau terakhir bagi kekecewaan dan rasa frustrasi manusia. Berbeda dengan orang yang tenang bertawakkal akan selalu menyerahkan urusannya kepada Allah swt, karena urusan mati memang bukan ada di tangan manusia. sikap ini juga mengatasi sikap stress yang dialami manusia.²⁶

Sementara ajaran tasawuf berupa *wara'* dalam pandangan imam al-Qusyairi adalah meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhat. Ibrahim bin Adham juga menjelaskan bahwa *wara'* adalah meninggalkan hal-hal yang syubhat dan yang tidak pasti (baca: tidak dikehendaki) dengan cara meninggalkan hal-hal yang bersifat tidak berfaedah.²⁷ Orang yang menjalankan ajaran ini tentu akan mempunyai sikap keberhati-hatian dalam menjalani kehidupan. mempunyai rasa takut terhadap apa yang dimakan dan yang dikerjakan tidak akan membuahkan kedekatan kepada Allah swt.

Sikap materialistik dan hedonisme adalah dua sikap yang sangat mendominasi manusia modern dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini bisa diobati dengan ajaran tasawuf berupa zuhud, dimana pada intinya ajaran zuhud ini berupa sikap kesadaran yang tidak mau diperbudak atau terperangkap oleh pengaruh dunia yang sementara. Jika sikap terpantri dalam diri setiap diri manusia modern, maka tidak akan berani menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan dengan cara culas. Sebab kesadaran yang akan dicapai dalam ajaran tasawuf berupa zuhud adalah menuju Tuhan, oleh karenanya, caranya harus dilakukan dengan cara yang disukai Tuhan.

Ajaran tasawuf yang dapat diterapkan dalam politik adalah konsep *uzlah* yaitu kesadaran untuk membebaskan diri dari perangkap kehidupan yang memperbudak. Dalam kehidupan modern ini konsep dan penerapan *uzlah* tidak harus menjadi seorang pertapa, dan meninggalkan

²⁶ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 298.

²⁷ Abu Qasim Abdul karim Hawzin al-Qusyairi an-Nisaburi, *Risalah al-Qusyairiyah*, (Kairo: Dar asy'b, 1989), 210.

kegiatan sosial. Manusia modern harus menjalankan aktivitas dunianya. Namun, menjadi aktivitas dunia sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dan dianjurkan tuhan. Ajaran tasawuf lainnya yang bisa diterapkan dalam kegiatan politik adalah sabar. dalam pandangan Jamaluddin al-Qasmini ad-Dimsyiqi diartikan sebagai keteguhan dalam menerima apa yang menimpa dirinya.²⁸ Sedangkan dalam pandangan Ibnu Athaillah sebagaimana dikutip Samsul Amin, mengartikan sabar sebagai bahan menghadapi cobaan dengan penuh kesopanan. dengan memiliki sikap seperti ini, seseorang akan tegar dan teguh dalam menghadapi urusan politik kekuasaan.

Selanjutnya, ajaran tasawuf berupa ridha adalah sikap ketulusan murni (*khalishan wa mukhlisan*), dan sesuatu yang dilakukan adalah semata hanya karena Allah, bukan karena pamrih manusia. Ajaran ridha dalam tasawuf akan membebaskan dari sifat arogansi, sikap memuji diri sendiri, merasa superioritas dan menompengkan diri. Sifat ridha akan memudahkan seorang salik untuk lebih memusatkan diri dalam perbuatan apapun, walaupun tidak terlihat manusia.²⁹

Sedangkan ajaran tasawuf berupa syukur adalah perasaan jiwa dan penyikapan yang selalu merasa cukup (*istighna*) terhadap segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah swt. dalam pandangan para ulama sebagai *fi'lun yunbiu an ta'dzimi al-Mu'im*, adalah perbuatan yang menengerai pengagungan Dzat Yang Maha Memberi nikmat. anugrah nikmat bisa berupa harta, tahta, ilmu, pengaruh, kedudukan, keahlian, kebahagiaan, kelapangan, kemerdekaan, kebebasan, keterhormatan, kelengkapan, kesehatan dan lain-lain.³⁰

Ajaran-ajaran tasawuf sebagaimana diuraikan di atas, tentu akan membuat seorang hamba yang terjun pada setiap urusan, termasuk dunia politik khususnya, akan terhindar dari perangai buruk, tercela, dan berdirinya kekukasaan politik yang adil yang akan diridhoi Allah swt. karena itu, tasawuf merupakan salah satu sarana yang penting dalam membangun peradaban manusia yang luhur dan beradab, serta sejahtera.

²⁸ Jamaluddin al-Qasmini ad-Dimsyiqi, *Mau'izhat al-Mu'minin*, (Dar Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, tht), 343.

²⁹ Said Aqil Siraj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan, 2006), 96.

³⁰ Cholil Bisri, *Menuju Ketenangan Batin*, (Jakarta: Kompas, 2008), 57-58.

Akhlak (etika) politik merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam realitas kehidupan.³¹

Penutup

Dalam realitasnya politik seringkali diartikan sebagai sebuah proses tindakan yang bertumpu pada keinginan masyarakat secara keseluruhan, dan setiap tindakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat dengan aturan-aturan moral dalam masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan. Kata politik, telah menjadi aktivitas dimana dalamnya sarat dengan makna kekerasan, manipulasi dan agitasi, serta pada suatu yang bersifat materialisme dan sekuler. sementara tasawuf bermakna bersih, suci, santun, penuh damai dan jauh dari manipulasi serta menjadikan seorang lebih baik tanpa harus meninggalkan kehidupan sosial, baik dalam tatanan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Kedua terminologi yang sangat berbeda akan terhubung dalam konteks penerapan politik kekuasaan. Di dunia Islam tasawuf menjadi salah satu jalan dalam memandu proses aktivitas politik dengan tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Maka seorang sufi harus mengambil peran dalam bidang sosial termasuk dalam pergolakan politik. Dari sinilah penerapan ajaran-ajaran tasawuf ke dalam aktivitas politik dalam aspeknya menjadi sangat penting.

Reference

Ad-Dimsyiqi, Jamaluddin al-Qasmini. *Mau'izhat al-Mu'minin*, Dar Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, tht.

³¹ Eny Suhaeni, "Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Politik Perspektif Sosiologi", *Rausan Fikr*, Vol.16 No. 1 Maret 2020, 109.

- al-Ghazali, Imam. *al-Tibr al-Masbuk fi al-Nasaihu al-Muluk*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- al-Qusyairi an-Nisaburi, Abu Qasim Abdul karim Hawzin. *Risalah al-Qusyairiyah*, Kairo: Dar asy'b, 1989.
- al-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghanimi, *al-Madkhal Ila al-Tasawwuf al-Islam*, al-Qahirah; dar al-Tsaqafah, tt.
- , *Sufi dan Zaman ke Zaman*, Bandung: pustaka, 1985.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Tasawuf*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Baqir, Haidar. *Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar*, Bandung: Mizan, 2017.
- Bisri, Cholil. *Menuju Ketenangan Batin*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Budiarjo, Mariam. *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Cowic , A.S. Hornby A.P. (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1974.
- Haeri, Shaykh Fadhlalla, *the Elements of Sufism*, USA: Element Inc, 1994.
- Hamka, *Renungan Tasawuf*, Jakarta: Republika, 2017.
- , *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1980.
- Hidayat, Komaruddin, dan Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama': Tafsir kepemimpinan Era Reformasi dan Dialektika Ulama-Negara*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Lassewell, Harol D. dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press, 1950.
- M. Solihin dan Rosihan Anwar, *Ilmu Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Maarif, A. Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Pencatutan dalam konsituante*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Mahmudi, Muhammad dan Ludfi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekosongan Hukum Penundaan Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum)*, Vol.2, No. 2, 2023.

- Mughi, Syafi A. *Dinamika Intelektual Islam pada Abad Kegelapan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.
- Nasution, Harus. *Teologi Islam Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Nata, Abuddin. *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Nurcholis, Ahmad. "Tasawuf Antara Kesalehan Individu dan Dimensi Sosial", *Jurnal Teosofi*, Volume I Nomor 2 Desember 2011.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Putra, Andi Eka. "Tasawuf dan Perubahan sosial-Politik", *Jurnal TAPis*, Januari-Juni, 2012, volume 8. No.1.
- Saeed, Abdullah. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Siraj, Said Aqil. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan, 2006.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1999.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1999.
- Suhaeni, Eny. "Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Politik Perspektif Sosiologi", *Rausan Fikr*, Vol.16 No. 1 Maret 2020.
- Suhayib, "Pemikiran Tasawuf Said Nursi dalam Pemberdayaan Politik (al-Tamkin al-Siyasi) Masyarakat Muslim Turki: Studi atas Kitab al-Matsnawi al-Nuri", *Jurnal An-Nisa*, Januari-Juni, Vol.38. No.01.
- Syukur, H.M. Amin, dan Masyaharuddin, *Intelektualisme Tasawuf: Studi dIntelektualisme Tasawuf al-Ghazali*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Syukur, HM. Amin. *Mengugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggungjawab Sosial Abad 21*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Thohir, Ajit. *Gerakan Politik Kaum Tarekat: Telah Historis Gerakan Politik Antikolonialisme Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah di Pulau Jawa*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.